

COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DESA, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN GAWAI DAYAK

Baselius Afrendi¹, Sri Widayanti²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia

Corresponding Author: baselius11@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.720>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-01

Abstrak: Seiring waktu, pelaksanaan dan fungsi Gawai Dayak telah mengalami perubahan akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keberagaman sosial dalam hal etnis, budaya, agama, pekerjaan, dan faktor lainnya. Beberapa permasalahan pun muncul, seperti anggapan bahwa Gawai Dayak merupakan beban finansial, generasi muda yang memandangnya sekadar sebagai hiburan tanpa makna budaya, konflik selama perayaan, serta keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naratif dengan Gawai Dayak sebagai objek penelitian, serta pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat lokal sebagai subjek. Penelitian dilakukan di Desa Umin Jaya, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gawai Dayak memiliki nilai budaya yang kuat, termasuk ritual seperti ngamik semangat padi yang melambangkan harapan akan hasil panen yang melimpah, dan ngemaik anak manik ke pian, sebuah ritual doa serta pelepasan pantangan. Festival ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan keluarga dan hiburan bersama masyarakat. Unsur kolaborasi dalam tata kelola (collaborative governance) terlihat melalui interaksi formal dalam kepanitiaan dan diskusi informal antaranggota. Kepercayaan dibangun selama proses pemilihan panitia dan terus dijaga sepanjang tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Gawai Dayak

PENDAHULUAN

Indonesia, yang dikenal sebagai negara seribu pulau, memiliki keberagaman yang luar biasa. Selain terdiri dari banyak pulau, Indonesia juga dihuni oleh sekitar 1.340 suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (1). Keberagaman suku ini menciptakan berbagai kebudayaan, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Kebudayaan nasional, seperti Bahasa Indonesia, Gotong Royong, dan Musyawarah, merupakan hasil interaksi antara berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, banyak kebudayaan lokal yang ada di masing-masing daerah, yang sering kali tidak dikenal di luar wilayahnya.

Taylor, sebagai tokoh pertama yang mendefinisikan kebudayaan menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat; sementara itu, istilah budaya dalam bahasa Sanskerta berasal dari buddhaya, bentuk jamak dari buddhi, yang merujuk pada aspek akal dan budi manusia (2). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan meliputi segala hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat (3). Kebudayaan bisa dibedakan menjadi dua jenis: budaya material dan non-material. Budaya material mencakup segala benda yang dihasilkan oleh manusia dan

dapat dilihat atau diraba, seperti alat rumah tangga atau pakaian, sementara budaya non-material berbentuk gagasan, nilai, norma, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat (4). Kebudayaan adalah hasil belajar dan bukan warisan biologis karena kebudayaan merupakan warisan sosial umat manusia yang kemudian di teruskan dari generasi ke generasi yang disebut enkulturasi. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan kebudayaan tidak hilang.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, kebudayaan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan banyak kebudayaan tradisional, seperti permainan tradisional, mulai ditinggalkan (5). Masyarakat kini lebih tertarik pada hiburan modern seperti game online, dan hal ini menyebabkan banyak nilai sosial yang berkembang dalam kebudayaan tradisional terkikis. Tidak hanya itu, modernisasi juga mempengaruhi hubungan dalam keluarga, di mana anak dan orang tua cenderung sibuk dengan gadget masing-masing, mengurangi interaksi antar generasi (6).

Selain pengaruh globalisasi, masuknya budaya asing juga turut mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Kurangnya pemahaman dan pembelajaran tentang kebudayaan sendiri membuat budaya asing mudah diterima oleh masyarakat. Contohnya, fenomena K-Pop yang mempengaruhi gaya hidup anak muda Indonesia, baik dalam berpakaian maupun berdandan (7). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia agar bisa melindungi dan melestarikannya dari pengaruh budaya luar yang datang begitu cepat.

Budaya Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai identitas bangsa, pedoman hidup, sarana perdamaian, dan penenang dalam masa sulit (8). Sebagai contoh, saat pandemi COVID-19, masyarakat adat Dayak Meratus melakukan ritual tolak bala untuk melindungi kampung mereka dari penyebaran virus (9). Namun, budaya Indonesia tidak selalu diakui, bahkan ada beberapa budaya yang diklaim oleh negara lain, seperti batik dan wayang kulit yang diklaim oleh Malaysia (10). Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pelestarian kebudayaan dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan nasional. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa upaya memajukan kebudayaan bukan hanya untuk pelestarian, tetapi juga untuk pembangunan jangka panjang bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dan harus dijaga dengan melibatkan peran desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk melestarikan kebudayaan lokal melalui pengaturan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa, serta membentuk lembaga adat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan adat istiadat di desa tersebut (11).

Salah satu budaya yang di Indonesia adalah Gawai Dayak merupakan salah satu budaya yang dikenal luas oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Secara umum, Gawai Dayak adalah pesta syukur atas hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak (12). Perayaan ini identik dengan tarian tradisional, busana adat, upacara adat, serta sajian makanan dan minuman khas. Setiap sub-suku Dayak menyelenggarakan Gawai dengan tata cara dan penyebutan yang berbeda, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga variasi pelaksanaan sering ditemui antar desa. Gawai Dayak menjadi bagian dari budaya karena dilaksanakan secara rutin setiap tahun setelah panen dan melibatkan seluruh masyarakat desa. Ada juga desa yang tidak menyelenggarakannya karena penduduk desa yang sudah bersifat multi etnis, jumlah masyarakat Dayak yang sedikit, atau tidak ada yang memahami atau melestarikan tradisi tersebut. Gawai Dayak dapat berfungsi membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat Suku Dayak (13).

Pelaksanaan dan fungsi Gawai Dayak juga mengalami perubahan karena pertumbuhan penduduk dan keberagaman dalam masyarakat. Salah satu penyebab utama perubahan adalah faktor agama, karena Gawai Dayak identik dengan hidangan babi yang menjadi masalah bagi penganut agama

tertentu. Selain itu, ada anggapan bahwa Gawai Dayak menyebabkan pemborosan karena setiap rumah harus menyediakan makanan, yang bisa memakan biaya besar. Makanan yang disajikan juga dianggap mencerminkan status sosial. Persoalan lainnya muncul dari masyarakat yang gagal panen atau tidak menanam padi, sehingga merasa terbebani atau tersisih dalam perayaan ini.

Salah satu Desa di Kalimantan Barat yang masih melaksanakan Gawai Dayak adalah Desa Umin Jaya. Desa Umin Jaya terletak di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Mayoritas Penduduknya adalah Suku Dayak, khususnya Suku Dayak Desa. Gawai Dayak di desa ini rutin diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni atau Juli, bahkan tetap dilaksanakan saat masa pandemi karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Perayaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya selalu mendapat antusiasme tinggi dari warga maupun pengunjung. Pengunjung yang datang biasanya memiliki hubungan keluarga dengan warga setempat atau sekadar ingin merasakan suasana Gawai Dayak. Selain partisipasi dari masyarakat umum, pelaksanaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya juga kerap dihadiri oleh perwakilan pemerintah, yang mencerminkan pengakuan terhadap nilai strategis perayaan ini dalam pelestarian identitas budaya serta penguatan solidaritas sosial masyarakat Dayak di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya bertepatan dengan peresmian gereja Katolik yang turut dihadiri pejabat daerah dan anggota DPR RI, yang diduga sekaligus melakukan kampanye politik. Perayaan ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana sebagian besar generasi muda lebih tertarik pada hiburan seperti musik dan minuman beram dibanding prosesi adat yang diikuti oleh orang tua. Selain itu, semakin sedikit masyarakat yang menanam padi karena keterbatasan lahan dan alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Permasalahan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Gawai Dayak yang seharusnya tercantum dalam RAB Desa dan diketahui oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kerja sama antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Gawai Dayak 2024 di Desa Umin Jaya sebagai upaya menjaga eksistensi budaya tersebut. Untuk menjelaskan kerja sama antara pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat, peneliti menggunakan rumusan masalah yaitu bagaimana pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat memaknai Gawai Dayak dan bagaimana kerjasama pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam melestarikan Gawai Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan Gawai Dayak menurut pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat serta untuk mengetahui menelusuri sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi Gawai Dayak. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori proses *collaborative governance* dan budaya Gawai Dayak.

Governance adalah paradigma baru yang berkembang sejak 1980-an di negara Barat, sebagai respons atas keterbatasan negara dalam menyelesaikan masalah publik, dengan mendorong pelibatan aktor non-negara seperti CSOs dan sektor swasta dalam proses pembangunan secara terbuka dan inklusif (14). Pemerintah tanpa Governance atau interaksi dengan pihak luar akan menjadikan pemerintah otokratik dan birokratik seperti dunia perkantoran (15). Pelestarian Gawai Dayak tidak terlepas dari peran pemerintah dan lembaga adat serta masyarakat agar tetap dilaksanakan meskipun dengan penyesuaian perubahan jaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode naratif. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup tradisi Gawai Dayak sebagai objek, serta pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat sebagai subjek. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Umin Jaya, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Observasi dilakukan secara langsung di Desa Umin Jaya dan diperoleh data bahwa pelaksanaan Gawai Dayak tahun 2024 berlangsung pada 28 juni

sampai 1 Juli dan diikuti oleh seluruh masyarakat, dengan prosesi adat seperti *ngamik semengat padi* dan *maik anak nyunggak ke pian*, serta lomba budaya dan hiburan musik. Wawancara dilakukan dengan sepuluh informan terpilih menggunakan teknik purposive sampling, informan yang dipilih sebagai informan adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua adat, dua orang anggota lembaga adat, ketua BPD, satu orang anggota BPD dan 3 orang Masyarakat. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen tertulis, foto, rekaman video, serta arsip lain yang berkaitan dengan peran pemerintah desa, lembaga adat, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini membahas proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Gawai Dayak dan kerjasama pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam melestarikan Gawai Dayak. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep proses kolaborasi Ansel & Gash yang terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan *intermediate outcomes* (16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan Gawai Dayak

Pada tahap perencanaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya, struktur pengelolaan menunjukkan pola *governance* yang masih bersifat hierarkis dan *top down*. Pemerintah desa menjadi aktor utama dalam menentukan arah, waktu, serta anggaran kegiatan tanpa partisipasi penuh dari lembaga adat dan masyarakat.

a. Penetapan Anggaran

Dalam teori *governance*, perencanaan partisipatif idealnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum deliberatif, seperti musyawarah desa, sehingga semua pihak dapat menyampaikan pandangan, menyepakati prioritas, dan membangun komitmen bersama terhadap alokasi sumber daya. Pendekatan ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga sarana untuk membangun *shared understanding* dan memperkuat *trust* antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam kasus Desa Umin Jaya, perencanaan Gawai Dayak pada tahun 2024 tidak melalui musyawarah desa. Tidak adanya forum deliberatif tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran maupun sumber dana kegiatan, sehingga prinsip transparansi yang menjadi pilar *good governance* belum terpenuhi. Dominasi pemerintah desa dalam penetapan anggaran tanpa mekanisme *shared decision making* menunjukkan bahwa proses kolaboratif baru terjadi pada tingkat implementasi teknis, sedangkan aspek strategis yang seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan masih sangat terbatas. Dari perspektif kerangka Ansell & Gash, kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan *trust* dan pemahaman bersama (*shared understanding*) antara pemerintah desa dan masyarakat belum sepenuhnya tercapai, sehingga kolaborasi masih bersifat *top down* dan belum menampilkan ciri *collaborative governance* yang sejati.

Meski begitu, terdapat indikasi awal terbentuknya jaringan kerja sama yang lebih luas. Variasi sumber dana, baik dari dana desa maupun bantuan pihak luar seperti anggota dewan, menunjukkan upaya pemerintah desa untuk memperluas jangkauan kolaborasi dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Inisiatif ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju *collaborative governance*, meskipun masih berpusat pada pemerintah desa sebagai aktor utama. Keberadaan beberapa mekanisme informal, seperti komunikasi personal antara aparat desa dan tokoh masyarakat untuk membahas kebutuhan kegiatan, menjadi bentuk awal *bottom up engagement* yang penting. Meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas dan belum berbentuk keputusan strategis, fondasi kolaboratif mulai terbentuk melalui pengelolaan sumber daya dan koordinasi kegiatan. Hal ini membuka peluang bagi pembangunan kolaborasi yang

lebih solid di masa mendatang, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga Gawai Dayak dapat menjadi arena nyata penerapan good governance yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia Gawai Dayak di Desa Umin Jaya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pemerintah desa terhadap ketua panitia, tanpa melibatkan lembaga adat maupun masyarakat dalam proses pemilihan. Praktik ini menunjukkan bahwa model governance yang diterapkan masih bersifat top down dan belum sepenuhnya partisipatif, di mana representasi masyarakat lebih bersifat simbolik daripada substantif. Akibatnya, pengambilan keputusan strategis terkait penyelenggaraan kegiatan masih berada di tangan pemerintah desa, sehingga kolaborasi lintas aktor belum terbentuk secara merata. Kondisi ini mencerminkan bahwa tahap shared decision making dan pembangunan trust antara pemerintah desa dan masyarakat belum optimal, sehingga partisipasi masyarakat baru sebatas tingkat formal atau administratif. Dari perspektif teori Ansell & Gash, proses ini menunjukkan bahwa shared understanding tentang tujuan dan strategi kegiatan belum sepenuhnya tercapai, sehingga kolaborasi masih terbatas pada level struktural, bukan pada level nilai dan tujuan bersama.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif melalui inisiatif ketua panitia yang terpilih, Bapak Beni, yang mulai melibatkan anak muda dan masyarakat adat dalam kepanitiaan. Langkah ini menjadi contoh *bottom up* engagement yang penting, karena tidak hanya memperkuat regenerasi budaya, tetapi juga memperluas kapasitas sosial (social capital) dalam penyelenggaraan adat. Keterlibatan generasi muda membantu membangun jaringan sosial yang lebih luas dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Gawai Dayak. Dalam kerangka Ansell & Gash, tindakan ini mencerminkan tahap awal commitment to the process, di mana aktor-aktor mulai menunjukkan komitmen bersama terhadap tujuan yang sama meskipun pengambilan keputusan strategis belum sepenuhnya setara. Dengan demikian, meski sistem formal masih bersifat top down, fondasi kolaborasi mulai terbentuk melalui partisipasi aktif masyarakat, yang menjadi modal penting bagi pengembangan collaborative governance di masa depan.

c. Perencanaan Kegiatan

Pada tahap ini mulai tampak kolaborasi lintas aktor yang lebih kuat dalam penyelenggaraan Gawai Dayak. Pertemuan yang dilaksanakan pada 20 Mei 2024 antara panitia, lembaga adat, dan kepala dusun menjadi ruang face to face dialogue, sesuai dengan saran Ansell & Gash (2007). Dialog ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai kegiatan inti Gawai Dayak, seperti tuak pemali, maik anak manik ke sungai, dan hiburan musik. Selain itu, terbentuknya grup WhatsApp panitia menjadi inovasi komunikasi yang memperkuat koordinasi lintas pihak, meskipun juga menyoroti adanya kesenjangan akses digital bagi tokoh adat yang tidak memiliki smartphone. Hal ini menunjukkan masih adanya digital divide dalam tata kelola desa, yang menjadi tantangan bagi inklusivitas partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan anggaran kegiatan yang awalnya sebesar Rp 22 juta, kemudian ditambah menjadi Rp 33 juta melalui proposal bantuan, menandakan adanya inisiatif kolaboratif nyata antara panitia dan lembaga adat. Tindakan ini memperlihatkan munculnya shared motivation dan joint responsibility, yang merupakan indikator penting dalam collaborative governance. Namun demikian, ketidakhadiran beberapa anggota panitia dalam rapat dan dominasi pengambilan keputusan oleh ketua menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan (trust) dan komitmen kolektif belum merata. Dengan demikian, kolaborasi yang

terjadi masih bersifat instrumental atau berorientasi pada hasil, belum sepenuhnya normatif atau berlandaskan nilai bersama, sehingga masih diperlukan penguatan dalam membangun kesepahaman dan tanggung jawab bersama yang lebih luas.

2. Tahap Pelaksanaan Gawai Dayak

Pelaksanaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya menunjukkan peningkatan kerja sama antara pemerintah desa, panitia, lembaga adat, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pola government yang bersifat birokratis menjadi governance yang lebih kolaboratif. Kegiatan berlangsung selama tiga hari (29 Juni – 1 Juli 2024) dengan beragam aktivitas, mulai dari lomba tradisional, ritual adat, hingga hiburan musik. Dari perspektif governance, fase ini memperlihatkan terbentuknya jaringan kolaboratif fungsional (*functional collaborative network*), meskipun stabilitas institusionalnya masih terbatas.

a. Partisipasi dan Pembagian Peran

Dalam pelaksanaan lomba dan ritual adat, terlihat adanya pembagian peran yang jelas antara panitia, lembaga adat, dan masyarakat. Lembaga adat bertanggung jawab terhadap perlengkapan upacara, seperti tuak pemali dan *maik anak manik ke sungai*, panitia mengatur jalannya perlombaan, sementara pemerintah desa menyediakan dukungan logistik. Pembagian peran ini memperlihatkan *horizontal collaboration*, yakni sinergi lintas aktor tanpa dominasi tunggal.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih terbatas; banyak warga hanya berperan sebagai penonton atau peserta, bukan sebagai pengambil keputusan. Partisipasi remaja juga tergolong rendah, terutama dalam lomba budaya seperti menyumpit dan berpantun. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam proses regenerasi budaya dan menuntut kebijakan kolaboratif yang lebih terarah pada edukasi serta pelibatan generasi muda, agar kelestarian budaya dapat terjaga secara berkelanjutan.

b. Koordinasi dan Permasalahan Teknis

Selama pelaksanaan Gawai Dayak, sejumlah kendala teknis muncul, seperti ketidakhadiran panitia, kerusakan laptop, hingga gangguan pada sistem suara. Kendala-kendala ini berhasil diatasi melalui komunikasi cepat dan gotong royong antaraktor, yang menunjukkan bahwa *trust building* mulai terbentuk secara praksis, bukan hanya bersifat formal. Penanganan masalah secara kolaboratif ini mencerminkan bahwa proses governance di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif ketika aktor-aktor berkomitmen untuk saling mendukung dan berkoordinasi.

Pelaksanaan ritual adat seperti *tuntung pekejang* dan *maik anak manik ke pian* juga memperlihatkan integrasi nilai-nilai keagamaan (ibadah Katolik) dengan budaya lokal, sehingga memperkaya dimensi *cultural governance*. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola tradisi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual dan identitas kolektif masyarakat. Selain itu, kebijakan lokal seperti retribusi Rp 50.000 untuk pedagang menegaskan implementasi prinsip *governance-based regulation*, di mana pengaturan ekonomi dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat, bukan sekadar instruksi pemerintah.

c. Hasil Antara (Intermediate Outcomes)

Keberhasilan pelaksanaan Gawai Dayak terlihat dari ramainya pengunjung, apresiasi dari tamu undangan, serta keterlibatan masyarakat lintas usia. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini dapat dikategorikan sebagai *small wins* menurut Ansell & Gash, yang berperan penting dalam

memperkuat kepercayaan antarpihak (*trust building*) dan membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih besar di masa mendatang. Hasil-hasil kecil semacam ini menunjukkan bahwa proses governance tidak hanya bersifat formal, tetapi mulai membangun komitmen kolektif dan motivasi bersama di antara para aktor.

Meskipun demikian, evaluasi kritis menunjukkan bahwa panggung budaya selama Gawai Dayak belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengekspresikan kreativitas masyarakat lokal. Hiburan musik modern masih mendominasi kegiatan, sementara seni tradisi mendapatkan porsi yang lebih kecil. Kondisi ini menjadi indikator bahwa *shared understanding* mengenai makna dan tujuan budaya Gawai Dayak masih dalam tahap pembentukan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk menyeimbangkan antara inovasi hiburan dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, sehingga kegiatan dapat menjadi sarana edukasi, regenerasi budaya, dan penguatan identitas kolektif masyarakat.

3. Tahap Evaluasi Gawai Dayak

Tahap evaluasi mencerminkan *reflective governance*, yaitu proses belajar kolektif dari pengalaman kolaborasi. Pertemuan evaluasi pada 22 Juli 2024 memperlihatkan adanya ruang *deliberative dialogue* antaraktor untuk menilai keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan.

a. Partisipasi dalam Evaluasi

Seluruh panitia hadir dan memberikan pandangan tentang pengalaman mereka. Dari sisi teori, ini merupakan bentuk *feedback loop* penting dalam *collaborative governance*, karena setiap aktor diberi ruang untuk menyuarakan pendapat. Munculnya apresiasi terhadap keterlibatan anak muda dan meningkatnya transparansi anggaran menandakan adanya peningkatan kapasitas kolaboratif. Lembaga adat dan panitia muda sama-sama mengakui bahwa kolaborasi lintas generasi menghasilkan sinergi baru dalam pengelolaan budaya.

b. Refleksi dan Pembelajaran Institusional

Permasalahan teknis yang muncul selama pelaksanaan Gawai Dayak, seperti kurangnya koordinasi antarpanitia, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta manajemen waktu yang kurang efisien, disepakati menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya. Kesadaran akan tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya proses *social learning* atau pembelajaran sosial di antara para aktor. Proses ini menjadi inti dari tata kelola yang berkelanjutan, karena setiap pihak belajar dari pengalaman nyata dan berusaha memperbaiki mekanisme kolaborasi. Dengan adanya evaluasi bersama, partisipasi masyarakat dan panitia dapat meningkat, sekaligus membangun fondasi untuk praktik *adaptive governance* yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Selain itu, pembahasan mengenai sisa anggaran dan pembagian honor panitia dilakukan secara terbuka. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, dua elemen kunci dalam *good governance*. Meskipun terdapat perbedaan persepsi, seperti kasus Bapak Atut yang tidak menerima honor, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan melalui konflik atau tindakan sepihak. Hal ini menjadi indikator nyata meningkatnya kepercayaan antarpihak (*trust building*) dan komitmen terhadap proses kolaboratif. Pendekatan semacam ini memperkuat dimensi normative governance, di mana nilai-nilai bersama dan keadilan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, sekaligus membuka peluang bagi kolaborasi lebih luas di masa depan.

c. Keberlanjutan Kolaborasi

Pembubaran panitia yang dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah desa, lembaga adat, gereja, dan masyarakat menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah membentuk jejaring sosial baru yang bersifat inklusif. Keterbukaan laporan pertanggungjawaban melalui grup WhatsApp masyarakat juga merupakan bentuk *digital transparency* yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Secara konseptual, tahap evaluasi ini telah mencapai “shared understanding” dan “trust building” sebagaimana diuraikan oleh Ansell & Gash, di mana semua aktor memiliki pandangan bersama bahwa Gawai Dayak adalah aset budaya dan sosial desa yang perlu dikelola secara kolaboratif.

Berdasarkan konsep *governance* dan *collaborative governance* Ansell & Gash, proses Gawai Dayak di Desa Umin Jaya menunjukkan dinamika sebagai berikut:

Tahap	Ciri Utama	Analisis Governance
Perencanaan	Dominasi pemerintah desa dalam anggaran dan panitia; muncul inisiatif keterlibatan anak muda	Kolaborasi awal, masih top-down; belum ada <i>shared understanding</i> penuh
Pelaksanaan	Sinergi antara pemerintah desa, panitia, lembaga adat, masyarakat; koordinasi efektif meski terbatas	<i>Face-to-face dialogue</i> dan <i>commitment to process</i> mulai terbentuk
Evaluasi	Diskusi reflektif, transparansi anggaran, perbaikan kelemahan bersama	Muncul <i>trust building</i> dan <i>shared learning</i> ; kolaborasi menuju tahap matang

Dengan demikian, Gawai Dayak 2024 dapat dipandang sebagai proses *transformasi governance* dari pola birokratis menuju model kolaboratif yang partisipatif, inklusif, dan berbasis nilai budaya lokal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Gawai Dayak di Desa Umin Jaya menggambarkan dinamika tata kelola yang sedang bertransformasi dari model *government* yang bersifat hierarkis menuju *governance* yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Berdasarkan tiga tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat terlihat bahwa kolaborasi antar aktor (pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat) mengalami perkembangan bertahap. Pada tahap perencanaan, peran pemerintah desa masih dominan dalam penentuan anggaran dan pembentukan panitia, sedangkan partisipasi lembaga adat dan masyarakat masih terbatas. Meskipun demikian, keterlibatan anak muda dan inisiatif penggalangan dana menunjukkan adanya komitmen awal menuju kolaborasi yang lebih inklusif. Pada tahap pelaksanaan, sinergi antaraktor mulai tampak nyata melalui pembagian peran dan komunikasi lintas lembaga. Praktik gotong royong, koordinasi cepat, dan munculnya inovasi seperti *digital communication* menunjukkan bahwa *trust building* dan *shared motivation* mulai tumbuh di tingkat lokal. Namun, partisipasi masyarakat umum masih perlu ditingkatkan agar kolaborasi tidak hanya berhenti pada level struktural panitia. Sedangkan pada tahap evaluasi, proses refleksi bersama menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. Evaluasi terbuka, diskusi reflektif, serta pelaporan anggaran secara daring menandakan kemajuan dalam *shared understanding* antaraktor. Kolaborasi yang terbangun selama proses Gawai Dayak membentuk modal sosial baru bagi tata kelola budaya berbasis masyarakat. Dengan demikian, Gawai Dayak 2024 dapat disimpulkan sebagai proses pembelajaran sosial (*social learning process*) yang memperkuat nilai-nilai *good governance* transparansi, partisipasi,

akuntabilitas, dan kepercayaan sekaligus memperlihatkan potensi kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat tata kelola kolaboratif di tingkat desa. Pemerintah desa perlu menjadikan kegiatan budaya seperti Gawai Dayak sebagai instrumen pembangunan sosial dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat menjadi kunci regenerasi budaya sekaligus investasi sosial bagi keberlanjutan tata kelola desa di masa depan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan data dan waktu observasi. Data yang dianalisis berfokus pada proses Gawai Dayak tahun 2024 di satu desa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk konteks daerah lain. Selain itu, keterbatasan dokumentasi dan partisipasi informan tertentu menyebabkan analisis belum sepenuhnya menggambarkan dinamika hubungan kekuasaan dan kepemimpinan adat secara mendalam. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan beberapa hal yaitu melakukan studi komparatif di beberapa desa atau wilayah untuk melihat variasi model *collaborative governance* dalam pelestarian budaya; menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda dalam proses penelitian; mengkaji lebih dalam dimensi digitalisasi dan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola kebudayaan; dengan langkah tersebut, diharapkan penelitian ke depan dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai kolaborasi, kepercayaan, dan partisipasi dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola budaya lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis yang berjudul "*Collaborative Governance Pemerintah Desa, Lembaga Adat, dan Masyarakat dalam Melestarikan Gawai Dayak*" ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, kesulitan, hambatan, maupun rintangan, sehingga hasilnya masih jauh dari kata sempurna. terselesaikannya tulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta saran yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sri Widayanti, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan semangat, arahan, bimbingan, serta menguji tesis ini; Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta; para dosen dan staf akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta; keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini; Pemerintah Desa Umin Jaya, Kecamatan Dedai, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama proses penelitian; serta rekan-rekan MIP 29 yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam menjalani proses perkuliahan.

REFERENSI

1. Jumaidi S, Indriawati T. Kompas.com. 2023 [cited 2024 May 13]. 10 Suku Bangsa Terbesar di Indonesia. Available from: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/16/130000879/10-suku-bangsa-terbesar-di-indonesia>. Membership: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>
2. Adib HM. Filsafat Ilmu ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015. 57 p.

3. Kebudayaan P, Indonesia N. No Title. 2017;
4. Azeharie S, Paramita S, Sari WP. Studi Budaya Nonmaterial Warga Jatón. *J ASPIKOM*. 2019;3(6):1153.
5. Wati E, Sari W, Ibrahim I, Rezeki S. Dampak Modernisasi terhadap Sopan Santun Generasi Milenial. 2023;3:66–72.
6. Manupputy F. Modernisasi Dan Perubahan Struktur Keluarga Pada Masyarakat Adat. 2022;7(2).
7. Sally Maghfirah A, Anggrainika V, Dian Sari Br Sinaga Y. Pengaruh Budaya K-Pop Terhadap Kehidupan Mahasiswa Universitas Diponegoro. *J Indones Sos Teknol*. 2022;3(02):250–8.
8. Akbar HM, Najicha FU. Upaya Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Pemahaman Wawasan Nusantara Di Era Gempuran Kebudayaan Asing. *J Kewarganegaraan [Internet]*. 2022;6(1):2122–7. Available from: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2939/pdf>
9. Fathurrahman. *kalsel.antaranews.com*. 2020 [cited 2024 May 13]. Masyarakat adat Dayak Meratus ritual tolak bala dan tutup kampung cegah COVID-19. Available from: <https://kalsel.antaranews.com/berita/159488/masyarakat-adat-dayak-meratus-ritual-tolak-bala-dan-tutup-kampung-cegah-covid-19>
10. Wulandari ST. *MediaIndonesia.com*. 2024. 9 Budaya Indonesia yang Diklaim Negara Lain. Available from: <https://mediaindonesia.com/humaniora/647532/9-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain>
11. Bender D. DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM Int Conf Proceeding Ser*. 2016;18-April-2(1):45–54.
12. Kristianus A. Gawai Dayak as Communication Media of Dayak People in Borneo. *Medio*. 2020;2(1):26–36.
13. Syafrita I, Murdiono M. Upacara Adat Gawai Dalam Membentuk Nilai-Nilai Solidaritas Pada Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Barat. *J Antropol Isu-Isu Sos Budaya*. 2020;22(2):151.
14. Arrozaaq DLC. Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijak dan Manaj Publik [Internet]*. 2016;3:1–13. Available from: <http://repository.unair.ac.id/67685/>
15. Eko S. Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintah Semesta)*. 2021;2(1):1–20.
16. LARANTIKA AAAD. Kolaborasi Aktor Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 2019.